



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PEMBATASAN KONSUMSI BBM BERSUBSIDI

Hilma Meilani

Peneliti Ahli Muda

hilma.meilani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Melonjaknya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang terdiri dari jenis Pertalite dan solar membuat pasokan PT Pertamina (Persero) semakin menipis sehingga kebutuhan pengaturan pembelian BBM bersubsidi menjadi mendesak. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar akan habis pada Oktober tahun 2022, di tengah rata-rata konsumsi masyarakat yang 10% di atas kuota harian. Pemerintah juga sedang mempercepat revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Berdasarkan data BPH Migas, realisasi konsumsi solar hingga 20 Juni 2022 sudah mencapai 51,24% dari kuota yang ditetapkan sebanyak 15,10 juta kiloliter pada APBN 2022. Sementara itu, realisasi penyaluran Pertalite sudah mencapai 13,26 juta kiloliter, atau sekitar 57,56% dari kuota yang ditetapkan sebanyak 23,05 juta kiloliter pada APBN 2022. Selama ini penggunaan Pertalite dan solar didominasi oleh kalangan mampu. Sebanyak 60% masyarakat mampu atau yang masuk golongan kaya mengonsumsi hampir 80% dari total konsumsi BBM bersubsidi, sedangkan 40% masyarakat rentan dan miskin hanya mengonsumsi 20% dari total subsidi energi tersebut.

Tingginya konsumsi BBM bersubsidi juga dilaporkan oleh PT Pertamina (Persero) yang mencatat konsumsi solar yang disalurkan sepanjang Januari-Mei tahun 2022 telah melebihi kuota. Kuota solar periode Januari-Mei 2022 ditargetkan sebesar 5,81 juta kiloliter, sedangkan konsumsi di periode yang sama mencapai 6,46 juta kiloliter, atau 11% di atas target. Adapun, kuota solar yang harus disalurkan Pertamina sepanjang tahun ini adalah sebanyak 14,91 juta kiloliter. Hal yang sama terjadi pada penyaluran Pertalite yang tercatat mencapai 11,7 juta kiloliter sepanjang Januari-Mei tahun 2022. Jumlah tersebut 24% di atas target pada periode tersebut yang sebanyak 9,53 juta kiloliter. Kuota Pertalite sepanjang tahun ini sebesar 23,05 juta kiloliter. Di sisi lain, porsi konsumsi BBM komersial seperti Pertamax, Turbo, Dexlite, dan Dex hanya sebesar 15% dari realisasi penyaluran seluruh jenis BBM per 22 Juni 2022 sebesar 24 juta kiloliter.

Untuk menjaga agar sisa kuota BBM bersubsidi cukup hingga akhir tahun, Pertamina melalui *Sub-holding Commercial & Trading* melakukan berbagai upaya, seperti pemantauan dengan teknologi digital, dan edukasi agar masyarakat mampu menggunakan BBM nonsubsidi. Pertamina juga melakukan pendataan pengguna BBM bersubsidi dengan mendorong masyarakat untuk melakukan pendaftaran pada *website* MyPertamina, agar profil pengguna BBM bersubsidi dapat teridentifikasi sehingga penyalurannya tepat sasaran.

Pertamina memulai tahapan uji coba pembelian Pertalite dan solar bagi pengguna terdaftar pada 1 Juli 2022. Uji coba dimulai dengan membuka pendaftaran kepada masyarakat di daerah yang menjadi lokasi percontohan di 11 kabupaten dan kota, yaitu: Bukittinggi, Padang Panjang, Kabupaten Agam, Tanah Datar (Sumatera Barat), Banjarmasin (Kalimantan Selatan),

Bandung, Tasikmalaya, Sukabumi, Ciamis (Jawa Barat), Manado (Sulawesi Utara), dan Yogyakarta (DI Yogyakarta). Program uji coba dan pendaftaran akan diperluas sambil menunggu kesiapan infrastruktur dan sistem.

Berbagai pro dan kontra muncul terkait penerapan aplikasi MyPertamina, mengingat penggunaan aplikasi sebagai langkah pembatasan penggunaan BBM bersubsidi baru pertama kali dilakukan dan belum teruji di lapangan. Kritik lainnya menilai pembatasan pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina tidak berdampak signifikan untuk menjaga kuota yang sudah terlanjur menipis hingga pertengahan tahun ini. Selain itu, tidak semua masyarakat memiliki perangkat seluler dan memiliki sambungan Internet yang bagus. Namun demikian, langkah pembatasan konsumsi Pertalite dan solar diharapkan dapat menutup celah kebocoran akibat pemakaian subsidi yang tidak tepat sasaran. Data yang didapat dari inisiatif pembatasan dapat menjadi *database* penerima subsidi BBM terintegrasi.

Penerapan aplikasi MyPertamina untuk mengakses BBM bersubsidi perlu pengawasan ketat. Kebocoran BBM bersubsidi ke industri atau kelompok mampu harus dihindari, agar program subsidi ini tepat sasaran. Penerapan aplikasi MyPertamina juga memerlukan sosialisasi yang masif dan setelah itu dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan.

Atensi DPR

Melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi dan penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran perlu mendapat perhatian oleh DPR RI, khususnya Komisi VII DPR RI. Dari sisi pengawasan, Komisi VII DPR RI perlu mengawal agar pemerintah mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan penyempurnaan dalam penerapan aplikasi MyPertamina agar BBM bersubsidi dinikmati masyarakat yang membutuhkan dan tidak ada kebocoran ke industri atau kelompok pemilik kendaraan mewah. Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mempercepat revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM untuk mengatur kriteria penerima BBM bersubsidi dan mekanisme penyalurannya.

Sumber

Bisnis Indonesia, 30 Juni 2022;
Kompas, 30 Juni dan 5 Juli 2022; dan
Media Indonesia, 4 Juli 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekuinbang
Sri Nurhayati Q.
Rasbin
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.